

Evaluasi Kebijakan Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama

Riska indriyani

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

riska.indriyani@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the policy resolution carried out by the Regional Government on the conflict between street vendors and the Bengkulu City Government at Panorama Market. This study uses a qualitative research method with a case study approach, informants The informant determination technique used is Purposive sampling. Research data was collected through data collection techniques, namely observation interviews and documentation. This study will focus on the Evaluation of the Conflict Policy Between Street Vendors and the Bengkulu City Government Panorama Market Study and more specifically using evaluation theory (William N. Dunn 2003) evaluation is a type of analysis that helps clarify, criticize and underlie environmental policies on street vendors, where Street Vendors who do not comply with the regulations that have been set by the government in Bengkulu City Regional Regulation No. 03 of 2008 concerning public order in the Bengkulu city area evaluation theory according to William N. Dunn (2003: 429) Indicators as follows: 1. Effectiveness 2. Efficiency 3. Adequacy 4. Equity 5. Responsiveness 6. Accuracy. From the 6 indicators, policies can be issued and conflicts resolved by street vendors who do not comply with the regulations set by the government can be resolved.

Keywords: Evaluation; Government policy; William N.Dunn;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu di Pasar Panorama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, informan Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama dan lebih spesifiknya menggunakan teori evaluasi (William N. Dunn 2003) evaluasi adalah tipe analisis yang membantu memperjelas, mengkritik dan mendasari kebijakan lingkungan pada pedagang kaki lima, dimana Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu teori evaluasi menurut William N. Dunn (2003:429) Indikator sebagai berikut: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan. Dari 6 indikator tersebut dapat mengel uarkan kebijakan dan menyelesaikan konflik Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan pemerintah; William N.Dunn;

Cite this article format:

Indriyani, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 219-230.

PENDAHULUAN

Perdagangan adalah Salah satu industri yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis didalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pasar merupakan tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atau negosiasi harga, serta jual beli. Cara lain untuk memandang pasar adalah sebagai ruang fisik tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk bertukar produk dan jasa.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang sangat penting untuk mendukung tumbuhnya otonomi daerah masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan cita-cita Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan otonomi masing-masing. dukungan terhadap cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep sistem otonomi seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Unsur organisasi dan pemimpin daerah adalah pemerintah daerah (Bloom and Reenen 2013).

Pedagang kaki lima atau yang dikenal dengan PKL mempunyai sejarah panjang dan tertib di kota-kota besar, termasuk Kota Bengkulu. Agar tidak mengganggu orang-orang yang berjalan di pinggir jalan, mereka tidak boleh meletakkan produk mereka lebih dari lima kaki (sekitar tiga meter) dari trotoar. Perdagangan jalanan telah berkembang menjadi alternatif atau jalan pintas untuk menghasilkan uang lebih cepat guna menghidupi keluarga dalam skenario ini, yang menjadi semakin lazim. Mereka memasarkan makanan, hasil bumi, atau pakaian jadi. Mereka tidak lagi memanfaatkan lahan tersebut. Lahan yang mereka manfaatkan tidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki (Koperasi et al. 2019).

Penurunan kualitas tersebut mencakup beberapa aspek seperti kawasan pejalan kaki atau jalur pejalan kaki yang tidak tertata dan kurang terawat, perubahan fungsi ruang hijau, atau transformasi menjadi tempat berkumpulnya pedagang kaki lima sehingga menghambat kenyamanan masyarakat kota untuk menikmati kawasan tersebut. Perbuatan para pedagang kaki lima selalu bertentangan dengan hukum atau adat istiadat yang berlaku, mengganggu lalu lintas, mencemari lingkungan, menghasilkan sampah, serta mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan (stories bengkululinfo 2023).

Sektor yang tidak terorganisir ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan banyak orang, namun juga menawarkan kesempatan kerja bagi individu dengan tingkat keterampilan yang buruk dan pendidikan formal yang rendah. Sektor informal menguntungkan sektor formal karena sektor ini menawarkan fasilitas manufaktur berbiaya rendah dalam bentuk tenaga kerja, pasokan produk dan jasa, atau pasokan barang dan jasa. Di sisi lain organisasi oposisi menyatakan bahwa sektor informal adalah penyebab terjadinya permukiman kumuh, kekacauan perkotaan, kemacetan dan kepadatan lalu lintas, peningkatan polusi, dan permasalahan lainnya.

Permasalahan yang sering terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Kepala Dinas Penindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu dengan permasalahan PKL yang sering berjualan di daerah yang bukan peruntukannya seperti jalan raya atau trotoar dan itu menghambat pergerakan lalu lintas. Sementara Pemerintah daerah telah mendirikan kios atau gedung tempat para pedagang berjualan kios tersebut dibangun pemerintah di dalam pasar, tidak jauh dari jalan raya. Namun para pedagang kaki lima setiap hari menumbat jalan membuat kemacetan di depan pasar panorama kota Bengkulu.

Namun kehadiran pedagang kaki lima memunculkan permasalahan lingkungan dan sosial terhadap ketertiban, kebersihan, dan daya tarik suatu kota. Area publik, yang seharusnya dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat umum untuk berjalan-jalan, berkendara, kini terganggu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas ruang kota kita saat ini sedang mengalami penurunan dan masih jauh dari standar persyaratan minimal untuk kota yang menyenangkan, khususnya berkaitan dengan kurangnya produksi dan penggunaan ruang terbuka.

Padahal kios yang telah dibangun dan didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan pengelolaan yang lebih tertib, dengan adanya gedung pengelolaan pasar dapat lebih terorganisir. Para pedagang kaki lima ini setiap hari menyumbat jalan dan membuat kemacetan di depan pasar Panorama Kota Bengkulu, padahal lokasi berjualan mereka sudah siap ditempati. Bahkan mereka masih ingin berjualan di pinggir jalan raya. Akibatnya gedung yang telah direnovasi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sekarang ini hanya sedikit yang ditempati oleh pedagang kaki lima.

Terbukti masih banyak pedagang kaki lima. menimbulkan kekacauan yang berujung pada kemacetan berkepanjangan di beberapa jalur di Kota Bengkulu, terutama menjelang musim liburan. Di Pasar Panorama, area menuju ke arah jalan semangka raya salah satu lokasi pedagang kaki lima yang menimbulkan kemacetan. Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima juga akan mengganggu kendaraan pribadi, angkutan umum, dan orang yang melintasi jalan sehingga menimbulkan kekacauan di jalan pasar panorama Kota Bengkulu (Bengkulu 2021).

Pemerintah kadang-kadang harus menangani masalah pedagang kaki lima, sehingga mustahil bagi media arus utama untuk mengabaikan masalah ini dalam satu bulan saja. Ada keterkaitan antara isu PKL dengan isu kemasyarakatan lainnya. Penanganan pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah secara sepihak dapat menimbulkan permasalahan baru dan jauh lebih kompleks. Karena masyarakat sering menentang persoalan penggusuran, kekacauan sering terjadi saat pembongkaran.

Problematika PKL yang mengakibatkan munculnya perlawanan dan kerugian yang berkelanjutan, memberikan lebih banyak bukti bahwa daerah pinggiran masih merupakan sisa dari kota metropolitan modern. penduduknya dalam masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan. Di sisi lain, untuk menjaga lingkungan perkotaan yang sehat, pemerintah daerah menuntut wajah kota yang menarik, bersih, dan tertata. Pemerintah lebih memilih posisi kedua, dengan menekankan

pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota, ketika diberikan pilihan antara perencanaan tata ruang kota dan kesejahteraan penduduknya. Hasil dari keputusan ini adalah pengorganisasian dan hukuman terhadap para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima di Pasar Panorama sudah terlalu sering diadakan pengusuran akan tetapi tetap saja kembali seperti awal lagi ketika Satpol PP meninggalkan pasar, mereka kembali berjualan seperti biasanya dan Pemerintah membangun kios berharap PKL akan menempati kios tersebut dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan tetapi tetap saja PKL bersikeras untuk berjualan di pinggir jalan dengan begitu banyak alasan. Di pinggir jalan, namun karena berbagai alasan, para pedagang kaki lima tetap bersikeras untuk mendirikan toko di sana. Menariknya, dari semua pasar yang ada di Kota Bengkulu, hampir semua pedagang kaki lima sudah menyelesaikan permasalahan pedagang kaki limanya, namun hanya Pasar Panorama yang belum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif Sesuai Saebani Beni A (2013), apa yang dimaksud Penelitian yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berpusat pada pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini atau permasalahan yang nyata. Data dikumpulkan, diorganisasikan, dan kemudian diperiksa. Dengan menggunakan teknik kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah mengungkap, menjelaskan, dan memahami secara utuh, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikannya secara metodis.

Teknik penelitian, menurut Noeng (dalam Noeng, 2016), adalah kajian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan instrumen penelitian. Ibid (dalam Noeng 2016) menyatakan bahwa teknik penelitian akan masuk ke dalam landasan teoritis dari berbagai pendekatan, serta kelebihan dan kekurangannya dalam karya ilmiah. Langkah selanjutnya adalah memilih metodologi penelitian yang akan diterapkan pada penelitian selanjutnya. Kajian kualitatif dilakukan dengan topik “Konflik Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Studi Pasar Panorama” merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu dengan mengandalkan logika dan penalaran yang lurus secara realitas yang ditangkap.

Strategi pengumpulan data adalah proses yang metodis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan, menurut Saebani Beni A (2016). Ada beberapa metode pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data ini menggunakan data primer dan sekunder, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui pertanyaan dan tanggapan terhadap orang-orang yang terlibat, menurut Saebani Beni A (2016). Wawancara dilakukan oleh oleh Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang sering dikenal dengan istilah “wawancara bebas”, di mana pewawancara bebas menyusun wawancara tanpa dibatasi oleh daftar pertanyaan yang telah ditentukan. Sebaliknya, pewawancara biasanya hanya dipandu oleh parameter wawancara. Dalam hal ini, penyelidik melakukan wawancara langsung dengan banyak sumber,

seperti:Peneliti mewawancarai pedagang kaki lima dan Kepala Dinas Perdagangan dan Penindustrian UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2. Observasi

Instrumen pengumpulan data adalah observasi, yaitu melihat obyek-obyek yang berhubungan dengan lokasi, aktor,kegiatan dan topik lain yang dinilai berkaitan dengan data yang diperlukan.Observasi ini adalah pendekatan metodologis awal terhadap topik yang diselidiki yang digunakan dalam studi ilmiah melalui observasi dan dokumentasi sistematis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Saebani Beni A. (2016) adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan cara yang mudah Mencari informasi mengenai pokok bahasan atau bahan tertulis tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut, seperti buku, terbitan berkala, surat kabar, catatan, dan sejenisnya, disebut dokumentasi.Materi ini memberikan informasi nyata dan tambahan mengenai keadaan atau kejadian sejarah dari sudut pandang obyektif. Data sekunder yang melengkapi data utama dikumpulkan dari dokumentasi ini. Dokumen seperti perjanjian kerja, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya memuat data ini. Model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa analisis data melibatkan tiga (tiga) tindakan, yaitu:

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas dari keterbatasan data, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencarinya di kemudian hari.
2. Penyajian Data: Tahap ini dilakukan setelah data diringkas. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Konfirmasi dan Membuat Pilihan Dalam analisis data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga. Temuan awal bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti kuat pada pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan .Bagian ini akan di uraikan hasil penelitian yang sudah di laksanakan di pasar panorama kota bengkulu dan Dinas Perdagangan Dan Penindustrian UPTD Pasar Kota Bengkulu.

Perselisihan Pedagang dan Pemerintah Kota Bengkulu

a. Perselisihan Berdasarkan Bidang Kehidupan

Berdasarkan bidang kehidupan peneliti hanya menemukan satu jenis temuan yang ada di Pasar Panorama Kota bengkulu yaitu perselisihan ekonomi terjadi karena adanya perubahan dan perkembangan manusia didalam kehidupan. Perkembangan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kebutuhan manusia.

Kedadaan Pasar Panorama di pagi hari selalu terjadi kemacetan karena jalanan yang diambil oleh PKL untuk berjualan mengakibatkan kemacetan. Pasar Panorama selain pasar, disini juga terminal angkot yaitu dimana tempat ini menjadi salah satu pangkalan angkot untuk mencari penumpang, karena terminal ini juga salah satu tempat transit angkot menuju berbagai tempat yang ada di Kota Bengkulu.

Pasar Panorama sangat padat kendaraan karena memang jalan itu tidak tertib, bukan hanya PKL saja yang mengganggu tetapi jalan itu tidak satu arah bahkan masih banyak kendaraan yang melewatinya dengan arah yang berbeda terutama kendaraan motor. Bahkan ada juga yang memang sengaja menaiki motor untuk sekalian berbelanja sayuran di pinggir jalan.

b. Perselisihan Berdasarkan Pelaku Yang Saling Bertentangan

Sedangkan dari dua jenis perselisihan berdasarkan pelaku peneliti juga menemukan satu konflik yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan di lingkungan Pemda Kota Bengkulu yang biasa disebut dengan konflik vertikal.

Perselisihan berdasarkan pelaku yang saling bertentangan adalah orang-orang yang terlibat konflik tersebut. Konflik yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu berawal sejak 7 tahun yang lalu sampai saat ini belum terselesaikan. PKL yang masih bersikeras untuk tetap berjualan diluar sampai Pemerintah mau merenovasi kios tersebut.

PKL masih tetap bersikeras untuk berjualan dipinggir jalan dengan alasan yang sama. PKL meminta agar Pemerintah mengubah bentuk kios yang sudah

Faktor Penyebab Konflik di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Faktor yang di temukan oleh peneliti di lapangan yaitu sektor Ekonomi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik biasanya disebabkan oleh bertambahnya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak bertambahnya untuk lapangan pekerjaan ini yang biasanya menjadi salah satu faktor penyebab konflik di Negara-negara berkembang.

Semakin bertambahnya jumlah PKL yang berjualan di Pasar Panorama ini mengakibatkan trotar, lahan parkir, hingga jalanan menjadi penuh diisi oleh PKL yang berjualan. Karena permasalahan ini akhirnya Pemerintah membangun sebuah kios untuk ditempati oleh PKL

Pembangunan kios sudah selesai ada beberapa pedagang yang sudah menempati kios tersebut akan tetapi ada juga pedagang yang masih bersikeras untuk berjualan di jalanan dengan alasan yang begitu banyak salah satunya mengatakan kios yang dibangun oleh Pemerintah yang terlalu kecil, dan akses jalan menuju kesana jauh dan becek.

Kebijakan Pemerintah Agar Pedagang Tertib dan nyaman

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut

1. Kebijakan Perjanjian Sosial

Penyelesaian konflik biasanya dilakukan untuk mengatur masyarakat agar masyarakat tidak hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok saja. Untuk menyelesaikan konflik tidak hanya mengandalkan moral yang ada didalam diri masyarakat maka tidak akan terselesaikan.

2. Kebijakan Membentuk Hukum

Dalam kebijakan Pemerintah akan memberikan surat teguran pertama, kedua, ketiga kepada pedagang yang masih berjualan yang bukan peruntukan nya. Teguran diberikan dengan tujuan agar tidak berjualan di area badan jalan. Satpol pp akan memberikan tenggang waktu kepada PKL untuk pindah atau membongkar sendiri selama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran diterima. Apabila teguran ini tidak diindahkan akan dilakukan penertiban dan pembongkaran secara paksa. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu melakukan penertiban terhadap para pedagang pasar Panorama yang membuka lapak di badan jalan, Para personel mengimbuu setiap pedagang yang dianggap melanggar ketertiban umum, seperti gelaran dagangan agak ke tengah maupun menggunakan armada angkutan pick up, sehingga menutupi jalan. hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban agar masyarakat berbelanja bisa dengan mudah dan arus transportasi menjadi lancar. Untuk penertiban skala besar, pihaknya akan berkerjasama dengan stakeholder baik TNI, Polri dan lainnya. Lebih lanjut, melalui peringatan humanis, pedagang diminta bisa memahami dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga aktivitas jual beli di pasar Panorama berlangsung tertib, lancar, aman dan kondusif. Selanjutnya pemerintah akan menegaskan pihak Satpol PP rutin melakukan patroli hingga malam hari di beberapa tempat yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn, ada enam kriteria pokok dalam mengevaluasi sebuah kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

a. Efektivitas

Menurut pendapat (William N. Dunn 2003) Efektivitas Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter nya.

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (effectiveness) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan.

Pengertian mengenai efektivitas menurut pendapat (Pekei 2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam Konflik yang ada di pasar panorama yang di temukan oleh peneliti Fenomena di lapangan yaitu Pembangunan kios yang tidak di tempati oleh pedagang kaki lima sedangkan pemerintah kota Bengkulu sudah membangun kios tempat pedagang melakukan usaha.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Pembangunan kios sudah sesuai dengan konsep dan belum bisa diubah, karena belum adanya serah terima. Karena saat pembangunan sempat ada kendala pembangunan antara pihak kontraktor dengan Pemda, adanya temuan pelanggaran hukum pihak ketiga kontraktor dengan PPTK sampai terjadi penyelidikan sampai sekarang belum terselesaikan. Jadi ini alasan kenapa pembangunan tidak bisa dirombak fisiknya. Akan tetapi kios tetap bisa ditempati untuk pedagang, asalkan pedagang bisa merawat tempat dagangan nya supaya tidak terjadi kerusakan dan tidak kenyamanan pada pedagang, tetapi pedagang tetap saja memilih berjualan di lahan yang seharusnya tempat parkir kendaraan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

b. Efisiensi

Menurut pendapat (William N.Dunn 2003) Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Menurut Bapak JA selaku Kepala UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Panorama Kota Bengkulu :

“untuk mengatasi pedagang yang tidak menaati peraturan Pemerintah telah memberikan tempat yang layak untuk pedagang berjualan yaitu gedung di dalam pasar panorama tetapi pedagang masih kekeh untuk berjualan di pingir jalan atau trotoar dan itu sudah tidak mematuhi perda no3 tahun 2008 tentang ketertiban umum dan wilayah kota Bengkulu. Maka dari itu pemerintah akan memberikan tindakan yaitu dengan cara pengusuran dan membuat surat perijinan pedagang dengan pemerintah. terkait penertiban pedagang pemerintah akan mendirikan sebanyak lima pos di Pasar Panorama guna mengawasi pedagang agar tidak berjualan di tepi jalan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan terpenuhi dalam berbagai hal. (William N.Dunn 2003) mengemukakan bahwa kecukupan Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Kebijakan yang akan di lakukan oleh pemerintah agar pedagang tertib pemerintah akan melakukan tindakan melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satop PP) akan memberikan

memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada para Pedagang Kaki lima (PKL) yang masih berjualan yang bukan peruntukan nya, Teguran diberikan dengan tujuan agar tidak berjualan di area badan jalan. Satpol pp akan memberikan tenggang waktu kepada PKL untuk pindah atau membongkar sendiri selama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran diterima. Apabila teguran ini tidak diindahkan akan dilakukan penertiban dan pembongkaran secara paksa. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu melakukan penertiban terhadap para pedagang pasar Panorama yang membuka lapak di badan jalan, Para personel mengimbuai setiap pedagang yang dianggap melanggar ketertiban umum, seperti gelaran dagangan agak ke tengah maupun menggunakan armada angkutan pick up, sehingga menutupi jalan. hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban agar masyarakat berbelanja bisa dengan mudah dan arus transportasi menjadi lancar. " (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

d. Pemerataan

Menurut pendapat (William N. Dunn 2003) Pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

"Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bengkulu terus melakukan penertiban secara merata terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan pada bahu jalan di kawasan Pasar Panorama. penertiban dilakukan terhadap pedagang yang dianggap melanggar ketertiban umum, seperti gelaran dagangan agak ke tengah maupun menggunakan armada angkutan bak terbuka, sehingga menutupi jalan. penertiban terhadap para pedagang yang mengganggu ketertiban umum. Ini dalam rangka menegakkan Perda terkait ketertiban umum, dan wilayah perda No 03 tahun 2008." (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

Menurut data di atas Penertiban tersebut terus dilakukan guna menjaga kenyamanan dan ketertiban agar masyarakat berbelanja bisa dengan mudah dan arus transportasi menjadi lancar.

a. Responsivitas

(William N. Dunn 2003) mengemukakan bahwa Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

"Kios yang disediakan oleh Pemerintah berjumlah 400 kios hampir terisi penuh tetapi karena pedagang merasa dagangan mereka tidak laku akhirnya ada beberapa pedagang yang lebih memilih untuk berjualan di luar kios. Bagi pedagang yang tidak mau berjualan di dalam gedung pasar panorama atau kios tempat PKL melakukan usaha nya yang telah dibangun pemerintah dan pedagang lebih memilih untuk berjualan di luar kios pemerintah akan membuat surat teguran kepada pedagang, apabila pedagang masih bersikeras untuk tetap berdagang di bahu jalan dan itu

mengganggu ketertiban lalu lintas selanjutnya pemerintah akan melakukan surat perjanjian 1,2,3 dan jika pedagang masih melanggar pemerintah akan melakukan pengusuran besar besaran untuk mengatasi pedagang yang berjualan di bahu jalan agar bisa untuk berjualan di dalam pasar.” (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

Menurut data di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah telah menyediakan kios tempat pedagang melakukan usaha nya dan pembagunan yang telah di sediakan memberikan manfaat bagi pedagang sebagaimana diungkapkan oleh Ibu S salah satu pedagang didalam kios di Pasar Panorama Kota Bengkulu :

“Saya lebih nyaman berjualan di dalam karena kalau di luar terjadi cuaca hujan pasti akan susah untuk menjaga barang dagangan karena di luar tidak disediakan fasilitas seperti di dalam jadi saya lebih merasa nyaman untuk berjualan di dalam dan itu bermanfaat menurut saya. Dan saya berharap agar Pemerintah bisa menyelesaikan masalah PKL yang berjualan di luar agar kami yang berjualan di dalam kios tidak merasa rugi karena sepi pembeli.” (wawancara dengan pedagang Ibu S pada tanggal 03 April 2024 pukul 12.20)

e. Ketetapan

(Wiliam N.Dunn 2003) ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Yang termasuk ketetapan yaitu Dampak kebijakan penataan dan pembinaan PKL bagi masyarakat Kota Bengkulu yang tertib dan nyaman. Menurut Bapak JA selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian UPTD pasar Panorama Kota Bengkulu:

kebijakan pemerintah untuk pedagang kaki lima sudah tepat sesuai dengan perda terkait ketertiban umum, dan wilayah perda No 03 tahun 2008. Penertiban tersebut terus dilakukan guna menjaga kenyamanan dan ketertiban agar masyarakat berbelanja bisa dengan mudah dan arus transportasi menjadi lancar. Dan pedagang kaki lima akan di arahkan untuk berjualan di dalam pasar dan itu bermanfaat bagi pedagang fasilitas yang di berikan oleh pemerintah agar pedagang tidak kepanasan dan kehangatan.” (wawancara dengan JA pada tanggal 03 April 2024 pukul 08.33)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi Kebijakan Konflik Dalam Menyelesaikan Masalah Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 03 Tahun 2008 tentang ketertiban umum dalam wilayah kota Bengkulu.

- a) Pemertaan Pemerintah mengeluarkan Kebijakan perjanjian sosial dan kebijakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satop PP) dan pemerintah kota Bengkulu akan memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada para Pedagang Kaki lima (PKL) yang masih berjualan yang bukan peruntukan nya, Teguran diberikan dengan tujuan agar tidak

berjualan di area badan jalan. Satpol pp akan memberikan tenggang waktu kepada PKL untuk pindah atau membongkar sendiri selama 7 (tujuh) hari sejak surat teguran diterima.

- b) Kecukupan Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. yang dilihat dari indicator adalah Pemberian relokasi yang cukup dan tepat bagi para PKL.
- c) Evaluasi yang akan dibuat Pemerintah Kedepannya setelah diadakan penggusuran besar - besaran maka juga dibantu dengan diadakan pos terpadu yang diisi oleh instansi terkait gabungan seperti LLAJ, Polisi, Disperindag, Bappenas. Seperti pasar yang ada di Jl. Kz. Abidin Kota Bengkulu dulu juga seperti itu, sekarang sudah mulai tertib PKL takut untuk berjualan kembali.

REFERENSI

- Batlajeri, Theodorus G.J., and Dan Poni Sukaesih. 2019. "Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Bengkulu, disperindag kota. 2024. "Dinas Penindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu." <https://disperindag.bengkulukota.go.id/visi-misi/>.
- Bengkulu, pemerintah provinsi. 2021. "Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu."
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Oleh DPRD." *NBER Working Papers*: 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Fildhania. 2020. "Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Keselamatan Pejalan Kaki (Studi Kasus Di Jalan Lingkar Kampus Kopelma Darussalam)."
- Hamid, Mubyarto &. 2016. 15 Kebijakan Politik Kebijakan Publik/Buku Eko Handoyo ; Editor : Mustrose Widya Karya, 2012.
- Kinerja, Laporan, and Instansi Pemerintah. 2018. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singaran Pati." *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*.
- Koperasi, Dinas, Usaha Kecil, Dan Menengah, and Kota Bengkulu. 2019. "Lkkip Tahun Anggaran 2019." (027).
- L1, Idrus. 2019. "Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran Idrus L 1." *Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran* (2): 920–35.
- Linarsih. 2017. *Resistensi Pedagang Kakik Lima (Studi Kasus Penggusuran Dari Pihak Satpol Pp Di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar)*.
- Pancasekti, Divana Eka. 2019. "Konflik Pedagang Kaki Lima Dengan Warga Taman Pinang Indah." : 1–10.

- Panorama, Pemerintah kota bengkulu UPTD Pasar. 2024. "Pemerintah Kota Bengkulu Rencana Strategis 2019-2023." Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorana Kota Bengkulu (0736).
- Peki. 2016. "Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi." *Civil Service Journal* 16(1): 89–106.
- Penduduk, Jumlah. 2023. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Saputra, tedy tri, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. 2016. "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2016/1437 H."
- Sholikhah. 2013. "Pedagang Kaki Lima Di Pasar RayaPadang 2018 Pedagang Kaki Lima Dipasar Raya Harus Pindah Ketempat Yang Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Kota Padang." *Slideshare.Net* 2(1): 545–55. <https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674>.
- Stories Bengkuluinfo. 2023. "Stories Bengkuluinfo Ruas Jalan Di Penuhi Pedagang Kaki Lima Akibatnya Menyebabkan Kan Kemacetan Lalu Lintas."
- Sugiono, William Santoso. 2016. "Konflik Pada Perusahaan Cv. Blessing Whitemenganalisis Bagaimana Konflik Yang Terjadi Pada Perusahaan CV. Blessing White, Konflik Apa Yang Sebenarnya Terjadi, Jenis Apa Konflik Yang Terjadi, Dan Tergolong Situasi Apakah Konflik Yang Terdapat Pada Perusaha." *Agora* 4(1): 267–74.
- Sunarto. 2015. "Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden." (August): 9–10.
- Suriadi, Andi. 2016. "Perlawanan Pedagang Kaki Lima Dalam Penertiban Pemda DKI Jakarta : Studi Kasus Di Perempatan Ciracas." (1): 1–2.
- Wibowo, Mardian. 2016. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12(2): 196.
- Willam N.Dunn, 2003:429). 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.